Andragogia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studies Islamic
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/andragogia

Vol. 2, No. 1, Juli 2025

Konsep *Wilayatul Faqih* Dan Supremasi Iran di Kawasan Timur Tengah

Bangkit Adi Saputra
Sekolah Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
email: bangkitadisaputra000@gmail.com

Keywords: *Wilayatul Faqih; Iran; Middle East; Hegemony; Regional Supremacy*

ABSTRACT

This research examines the concept of Wilayatul Faqih and its role in Iran's supremacy in the Middle East region. Using qualitative research methods through library research, this study analyzes how the Wilayatul Faqih concept has become the ideological foundation for Iran's foreign policy and regional hegemony strategy. The research employs hegemony theory to comprehensively analyze Iran's dominance mechanisms in the Middle East. The findings indicate that Wilayatul Faqih serves not only as a domestic governance system but also as a tool for projecting Iranian influence across the region through proxy groups, religious networks, and strategic alliances. The study concludes that Iran's regional supremacy is built upon the combination of religious legitimacy from Wilayatul Faqih and pragmatic geopolitical strategies.

Kata Kunci: Wilayatul Faqih; Iran; Timur Tengah; Hegemoni; Supremasi Regional

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep *Wilayatul Faqih* dan perannya dalam supremasi Iran di kawasan Timur Tengah. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep *Wilayatul Faqih* menjadi landasan ideologis bagi kebijakan luar negeri Iran dan strategi hegemoni kawasan. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme dominasi Iran di Timur Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Wilayatul Faqih* tidak hanya berfungsi sebagai sistem tata kelola domestik, tetapi juga sebagai alat untuk memproyeksikan pengaruh Iran di kawasan melalui kelompok-kelompok proksi, jaringan keagamaan, dan aliansi strategis. Studi ini menyimpulkan bahwa supremasi regional Iran dibangun atas kombinasi legitimasi agama dari *Wilayatul Faqih* dan strategi geopolitik pragmatis.

PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah telah menjadi arena persaingan geopolitik yang kompleks, dimana berbagai aktor regional dan internasional berusaha memperluas pengaruh mereka. Dalam konteks ini, Iran telah muncul sebagai kekuatan regional yang signifikan dengan menggunakan konsep *Wilayatul Faqih* sebagai landasan ideologis untuk strategi hegemoni kawasannya.(Kumar, 2016) Sejak Revolusi Islam 1979, Iran telah mentransformasi sistem politiknya

berdasarkan konsep *Wilayatul Faqih* yang dirumuskan oleh Ayatollah Khomeini, yang tidak hanya mengatur tata kelola domestik tetapi juga menjadi kerangka teoritis bagi proyeksi kekuatan regional.(Kadir, 2015)

Wilayatul Faqih, secara harfiah menurut ulama Syiah berarti kedudukan seorang faqih (ulama ahli fikih) yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memberikan fatwa dan hukum. Setara dengan pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas mutlak sebagai wakil Tuhan di dunia dan Imam *al-Muntazhar* (Imam kedua belas yang ditunggu kedatangannya di masa kegaibannya).(Iqbal, 2020) Konsep *Wilayatul Faqih* merupakan konsep yang memberikan legitimasi religius bagi kepemimpinan politik dalam negara Islam. Konsep ini menjadi unik karena menggabungkan otoritas spiritual dan temporal dalam satu figur pemimpin tertinggi.(Doix, 2017) Dalam konteks Iran kontemporer, konsep ini telah berkembang menjadi instrumen *soft power* yang efektif untuk memperluas pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah, khususnya di negara-negara dengan populasi Syiah yang signifikan seperti; Lebanon, Syria, dan Iraq ataupun kelompok-kelompok milisi seperti Hamas di Gaza, Palestina.(Jones, 2020a)

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Iran di Timur Tengah umumnya fokus pada aspek geopolitik dan ekonomi, namun kurang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana konsep *Wilayatul Faqih* berkontribusi terhadap strategi hegemoni Iran. Seperti Artikel karya Ariel Limanya Limbu dan Ronen A. Cohen yang berjudul *"A State Under Siege: Iran's Survival Through Alter-Globalization and the Third Way"* yang menyimpulkan bahwa Iran menciptakan jalannya sendiri berdasarkan interpretasi Islam dan melibatkan kekuatan domestik yang berkomitmen pada jalur revolusi ideologis untuk menemukan jalan memutar yang akan memungkinkan Iran untuk mengambil bagian dalam ekonomi global tanpa terpengaruh Kapitalisme Barat maupun Sosialisme Timur.(Limanya Limbu & Cohen, 2025) Juga dalam buku *berjudul "Handbook of Islamic Sects and Movements"* bagian chapter ke-8 *"Imamiyya Shi'a (The Twelevers)"* karya Mohammad Fazlhashemi menunjukkan bahwa pandangan tentang kekuasaan sekuler dalam Syiah Imāmiyyah dan legitimasi keagamaan atas kekuasaan duniawi didasarkan pada beberapa hal pada gagasan teologis dan yurisprudensi Syiah Imāmiyyah, tetapi pandangan tersebut telah mengalami perubahan besar karena keadaan sosial, politik, dan sejarah.(Fazlhashemi, 2021) Selain itu, dalam laporan penelitian *Danish Institute for International Studies* (DIIS) berjudul *"Iran's Successful Transnational Network: Iranian Foreign Policy Untilizes Partners"* karya Maria-Lousie Clausen menjelaskan bahwa pendekatan politik luar negeri Iran sukses membangun jaringan transnasional seperti memberikan dukungan baik secara diplomasi maupun persenjataan militer pada kelompok Hizbullah di Lebanon, kelompok

Houthi di Yaman, juga memberikan dukungan pada poros-poros perlawan di Iraq dan Syria.(Clausen, 2020)

Beberapa studi di atas telah menganalisis kebijakan luar negeri Iran atau dinamika konflik regional di Timur Tengah, tetapi belum ada yang secara komprehensif menghubungkan konsep *Wilayatul Faqih* dengan proyeksi kekuatan regional Iran dalam upaya memperkuat pengaruhnya di kawasan.

Kekosongan dalam literatur ini menjadi penting untuk diisi mengingat konsep *Wilayatul Faqih* memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar sistem politik domestik. Konsep ini telah menjadi ideologi ekspor yang memungkinkan Iran membangun jaringan pengaruh transnasional melalui kelompok-kelompok proksi, institusi keagamaan, dan aliansi strategis. Penelitian ini menawarkan analisis komprehensif mengenai bagaimana konsep *Wilayatul Faqih* menjadi fondasi bagi ambisi hegemoni Iran di kawasan Timur Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran konsep *Wilayatul Faqih* dalam membentuk strategi supremasi Iran di kawasan Timur Tengah, mengidentifikasi mekanisme proyeksi pengaruh Iran melalui konsep ini, dan mengevaluasi efektivitas strategi hegemoni Iran dalam konteks dinamika geopolitik regional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang mengkaji konsep teoritis dan fenomena politik yang kompleks. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah Iran, pidato-pidato para pemimpin Iran, konstitusi Iran, dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan konsep *Wilayatul Faqih.* Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku akademik, laporan *think tank*, dan publikasi media massa yang membahas politik Iran dan dinamika kawasan Timur Tengah.(Nasution, 2023)

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-intrepetatif menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci.(Thomas R. Bates, 1975) Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori hegemoni sebagai kerangka teoretis untuk memahami mekanisme dominasi Iran di kawasan Timur Tengah. Proses analisis meliputi kategorisasi data, identifikasi pola-pola, dan interpretasi makna dalam konteks teoritis yang digunakan.(Abdussamad, 2021) Teori hegemoni Gramsci menekankan bahwa dominasi tidak hanya dicapai melalui kekuatan koersif tetapi juga melalui konsensus dan kepemimpinan intelektual serta moral.(Patria, Nezar & Arief, 2015) Dalam konteks penelitian ini, konsep *Wilayatul Faqih* dipandang sebagai instrumen hegemoni yang

memungkinkan Iran membangun konsensus ideologis dan legitimasi moral di kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Wilayatul Faqih* dalam Teori dan Praktik

Wilayatul Faqih merupakan konsep yang secara historis berakar pada tradisi jurisprudensi Islam Syiah, namun implementasinya dalam konteks negara modern merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Ayatollah Khomeini. Konsep ini mengandung tiga dimensi utama: legitimasi religius, otoritas politik, dan tanggung jawab moral.(Patria, Nezar & Arief, 2015) Dalam teori Gramsci tentang hegemoni, konsep *Wilayatul Faqih* dapat dipahami sebagai upaya membangun kepemimpinan intelektual dan moral yang menciptakan konsensus di antara masyarakat. Khomeini mengargumentasikan bahwa dalam ketiadaan Imam Mahdi yang gaib, seorang *faqih* (ahli fikih) yang memiliki kompetensi dan integritas moral memiliki otoritas untuk memimpin umat Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik dan sosial.(Ghasseminejad, Taleblu, & Katz, 2020)

Transformasi konsep *Wilayatul Faqih* dari teori klasik menjadi sistem politik modern melibatkan proses adaptasi yang kompleks terhadap realitas negara-bangsa kontemporer. Dalam tradisi fikih Syiah klasik, konsep ini lebih bersifat individual dan terbatas pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat. Namun, Khomeini memperluas interpretasi ini dengan mengintegrasikan konsep kepemimpinan spiritual dengan struktur negara modern. Inovasi ini menciptakan legitimasi yang unik di mana otoritas politik tidak hanya berasal dari kontrak sosial atau mandat rakyat, tetapi juga dari legitimasi ilahiah yang diperoleh melalui penguasaan ilmu agama dan kualitas moral yang tinggi.(Belal, 2020)

Implementasi *Wilayatul Faqih* di Iran telah menciptakan sistem politik yang unik di mana otoritas tertinggi berada di tangan seorang pemimpin spiritual yang memiliki legitimasi religius. Sistem ini tidak hanya mengatur tata kelola domestik tetapi juga menjadi basis ideologis bagi kebijakan luar negeri Iran. Pemimpin Tertinggi *(Rahbar)* memiliki otoritas untuk menentukan arah kebijakan strategis, termasuk dalam hubungan internasional dan proyeksi kekuatan regional. Struktur ini menciptakan hierarki kekuasaan yang menempatkan legitimasi religius di atas legitimasi demokratis, di mana institusi-institusi elektif seperti presiden dan parlemen beroperasi dalam kerangka yang ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi.(Cherstich, Holbraad, & Tassi, 2020)

Dalam konteks praktik politik Iran, konsep *Wilayatul Faqih* telah mengalami evolusi yang signifikan sejak Revolusi Islam 1979. Periode

kepemimpinan Khomeini (1979-1989) ditandai dengan implementasi konsep ini dalam bentuk yang relatif murni, di mana otoritas Pemimpin Tertinggi bersifat absolut dan tidak terbantahkan. Namun, setelah wafatnya Khomeini, implementasi konsep ini mengalami modifikasi untuk mengakomodasi realitas politik yang lebih kompleks. Masa kepemimpinan Ali Khamenei sejak 1989 menunjukkan adaptasi pragmatis dimana konsep *Wilayatul Faqih* diintegrasikan dengan mekanisme politik modern seperti pemilihan umum dan *check and balances* antar institusi, meskipun otoritas tertinggi tetap berada di tangan Pemimpin Tertinggi.(Kadir, 2015)

Signifikansi konsep *Wilayatul Faqih* dalam konteks regional tidak dapat dilepaskan dari dimensi transnasionalnya yang memungkinkan Iran memproyeksikan pengaruh ideologis ke luar batas teritorialnya. Konsep ini menyediakan kerangka teoritis yang memungkinkan Iran mengklaim kepemimpinan moral dan spiritual terhadap komunitas Muslim Syiah global. Hal ini menciptakan *soft power* yang unik di mana Iran tidak hanya beroperasi sebagai negara-bangsa modern tetapi juga sebagai pusat spiritual yang memiliki tanggung jawab terhadap umat Islam di seluruh dunia. Dalam konteks teori hegemoni Gramsci, hal ini merepresentasikan upaya membangun blok historis yang melampaui batas-batas geografis dan etnis, didasarkan pada kesamaan ideologis dan spiritual.

Mekanisme Proyeksi Pengaruh Regional

Iran telah menggunakan konsep *Wilayatul Faqih* sebagai *soft power* untuk membangun jaringan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Mekanisme proyeksi pengaruh ini dapat dikategorikan ke dalam tiga strategi utama: pembentukan aliansi ideologis, dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi, dan pengembangan jaringan institusi keagamaan. Strategi ini mencerminkan pemahaman mendalam Iran tentang dinamika regional yang tidak hanya didominasi oleh pertimbangan geopolitik semata, tetapi juga oleh faktor-faktor identitas, ideologi, dan legitimasi religius. (Jones, 2020b) Dalam konteks teori hegemoni Gramsci, mekanisme ini merepresentasikan upaya sistematis untuk membangun kepemimpinan intelektual dan moral yang dapat menciptakan konsensus ideologis di kawasan.(Simon, 2004)

Keberhasilan Iran dalam mengimplementasikan mekanisme proyeksi pengaruh ini didasarkan pada kemampuan untuk mengintegrasikan instrumen-instrumen *soft power* dan *hard power* dalam satu strategi yang koheren. Konsep *Wilayatul Faqih* menyediakan legitimasi ideologis yang memungkinkan Iran tidak hanya beroperasi sebagai negara yang mengejar kepentingan nasional, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memiliki tanggung jawab moral terhadap

umat Islam. Hal ini menciptakan daya tarik yang unik bagi kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau tertindas, tidak hanya di kalangan komunitas Syiah tetapi juga di antara kelompok-kelompok Muslim yang memiliki orientasi resistensi terhadap dominasi Barat.(Itzchakov, 2025)

Efektivitas mekanisme proyeksi pengaruh Iran juga didukung oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks lokal yang berbeda-beda. Iran tidak menerapkan pendekatan yang uniform dalam semua konteks regional, tetapi menyesuaikan strategi dengan karakteristik politik, sosial, dan budaya masing-masing negara atau wilayah. Fleksibilitas ini memungkinkan Iran untuk membangun aliansi yang beragam, mulai dari kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi ideologis yang kuat hingga aktor-aktor yang lebih pragmatis yang melihat kerjasama dengan Iran sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri.(Bardají, 2016)

Dimensi transnasional dari mekanisme proyeksi pengaruh Iran menciptakan tantangan yang unik bagi negara-negara yang berusaha membatasi ekspansi pengaruh Iran di kawasan. Berbeda dengan proyeksi kekuatan konvensional yang lebih mudah diidentifikasi dan diatasi, penggunaan konsep *Wilayatul Faqih* sebagai instrumen *soft power* menciptakan jaringan pengaruh yang lebih tersembunyi dan sulit untuk dibongkar. Jaringan ini beroperasi melalui saluran-saluran informal seperti hubungan personal, institusi keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki legitimasi lokal yang kuat.(Rijal & Palangkey, 2021)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah semakin memperkuat efektivitas mekanisme proyeksi pengaruh Iran. Melalui media sosial, platform digital, dan jaringan komunikasi modern, Iran dapat menyebarkan narasi ideologis dan memperkuat jaringan pengaruh dengan biaya yang relatif rendah dan jangkauan yang sangat luas. Hal ini memungkinkan Iran untuk membangun komunitas virtual yang melampaui batas-batas geografis dan menciptakan solidaritas ideologis yang dapat dimobilisasi untuk mendukung kepentingan strategis Iran di kawasan.(Uygur, 2021) Pertama, dalam strategi aliansi ideologis Iran telah membangun aliansi dengan berbagai kelompok dan organisasi di kawasan yang memiliki afiliasi ideologis dengan konsep *Wilayatul Faqih.* Aliansi ini tidak selalu didasarkan pada kesamaan mazhab Syiah, tetapi juga pada solidaritas anti-imperialis dan resistensi terhadap hegemoni Barat. Dalam konteks teori hegemoni Gramsci, strategi ini merepresentasikan upaya membangun blok historis yang dapat mendukung proyeksi kekuatan Iran.

Kedua, dalam strategi kelompok proksi Iran mendukung penuh kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan berbagai milisi Syiah di Irak dan Syria merupakan manifestasi konkret dari strategi

hegemoni berdasarkan konsep *Wilayatul Faqih.* Dukungan ini tidak hanya bersifat material tetapi juga ideologis, dimana Iran menyediakan legitimasi religius bagi aktivitas kelompok-kelompok tersebut. Terakhir, dalam strategi jaringan institusi keagamaan Iran telah membangun jaringan institusi keagamaan yang luas di kawasan Timur Tengah, termasuk *hawza* (seminari Islam), yayasan keagamaan, dan pusat-pusat kajian Islam. Jaringan ini berfungsi sebagai instrumen hegemoni kultural yang memungkinkan Iran menyebarkan interpretasi Islam yang sesuai dengan konsep *Wilayatul Faqih.*

Efektifitas Strategi Hegemoni Iran

Implementasi strategi hegemoni Iran di Lebanon melalui Hizbullah merupakan salah satu kasus paling sukses dalam proyeksi pengaruh regional berdasarkan konsep *Wilayatul Faqih*. Sejak didirikan pada tahun 1985, Hizbullah telah berkembang dari sebuah gerakan milisi menjadi kekuatan politik dominan yang menguasai hampir sepertiga kursi parlemen Lebanon.(Hage Ali, 2019) Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan Iran menyediakan legitimasi religius melalui konsep *Wilayatul Faqih* yang memberikan dasar ideologis bagi perjuangan Hizbullah melawan pendudukan Israel dan hegemoni Barat.(Samaan, 2015) Dukungan material Iran terhadap Hizbullah telah mencapai estimasi 700 juta dolar per tahun, mencakup persenjataan canggih, pelatihan militer, dan bantuan ekonomi untuk program-program sosial.(Homan, 2018) Bantuan ini tidak hanya bersifat transaksional tetapi juga ideologis, dimana Iran menyediakan kerangka teoretis *Wilayatul Faqih* yang memungkinkan Hizbullah membangun legitimasi di kalangan masyarakat Syiah Lebanon.(Khan & Zhaoying, 2020) Konsep ini telah memungkinkan Hizbullah untuk memposisikan dirinya bukan hanya sebagai kelompok perlawanan tetapi juga sebagai representasi otentik dari aspirasi politik dan spiritual masyarakat Syiah.

Dalam konteks teori hegemoni Gramsci, keberhasilan Iran di Lebanon menunjukkan efektivitas strategi membangun kepemimpinan intelektual dan moral melalui institusi masyarakat sipil. Hizbullah telah membangun jaringan yang luas meliputi sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan program-program kesejahteraan sosial yang mencakup lebih dari 400 institusi.(Kane, 2018) Jaringan ini berfungsi sebagai instrumen hegemoni kultural yang memungkinkan Iran menyebarkan nilai-nilai dan interpretasi Islam yang sesuai dengan konsep *Wilayatul Faqih.*(Humire, 2020) Keberhasilan strategi hegemoni Iran di Lebanon juga terlihat dari kemampuan Hizbullah untuk mempertahankan legitimasi politik meskipun menghadapi tekanan internasional yang intens. Organisasi ini telah berhasil membangun konsensus di kalangan masyarakat Syiah Lebanon bahwa perlawanan terhadap Israel dan hegemoni Barat merupakan kewajiban religius

yang dilegitimasi oleh konsep *Wilayatul Faqih*.(Nilsson, 2020) Hal ini menciptakan solidaritas ideologis yang melampaui kepentingan material dan memperkuat posisi Iran dalam sistem politik Lebanon.

Dampak jangka panjang dari hegemoni Iran di Lebanon terlihat dari transformasi Hizbullah menjadi negara dalam negara yang memiliki kapasitas militer yang melebihi tentara nasional Lebanon. Organisasi ini telah membangun sistem pemerintahan paralel yang mencakup sistem peradilan, layanan keamanan, dan infrastruktur ekonomi yang independen. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi hegemoni Iran melalui konsep *Wilayatul Faqih* tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga mampu menciptakan transformasi struktural yang berkelanjutan.

Situasi Iran di Irak juga menunjukkan kompleksitas implementasi strategi hegemoni dalam konteks politik yang lebih heterogen dan terfragmentasi. Meskipun Iran memiliki keuntungan demografis dengan mayoritas populasi Syiah di Irak, proyeksi pengaruh melalui konsep *Wilayatul Faqih* menghadapi resistensi dari berbagai kelompok nasionalis Syiah yang menolak dominasi asing. Kelompok-kelompok seperti *Muqtada al-Sadr* telah secara konsisten menentang pengaruh Iran meskipun memiliki afiliasi mazhab yang sama, menunjukkan bahwa identitas sektarian tidak selalu menjamin loyalitas politik.(Keskin, 2024) Strategi Iran di Irak menghadapi dilema antara mempertahankan legitimasi religius dan mengakomodasi realitas politik domestik yang kompleks. Konsep *Wilayatul Faqih*, yang mensyaratkan loyalitas kepada pemimpin spiritual tertinggi Iran, bertentangan dengan aspirasi nasionalisme Irak yang menginginkan kedaulatan penuh.(Smyth, Michetti, & Daniels, 2017) Hal ini menciptakan ketegangan internal di kalangan kelompok-kelompok Syiah Irak, di mana sebagian mendukung orientasi pro-Iran sementara sebagian lainnya mengadvokasi independensi politik dari pengaruh eksternal.

Kehadiran militer Amerika Serikat di Irak sejak 2003 telah menjadi faktor kompleks bagi strategi hegemoni Iran.(Murauskaite, 2016) Meskipun Iran berhasil membangun jaringan yang kuat melalui kelompok-kelompok milisi seperti *Hashd al-Shaabi*, pengaruh Amerika Serikat dalam sistem politik dan keamanan Irak tetap substansial.(Connable, 2020) Kompetisi ini menciptakan polarisasi politik yang membatasi kemampuan Iran untuk membangun konsensus nasional yang diperlukan untuk hegemoni yang efektif. Efektivitas strategi Iran di Irak juga terhambat oleh fragmentasi internal di kalangan kelompok-kelompok proksi yang didukung Iran. Berbagai faksi milisi memiliki agenda politik yang berbeda dan seringkali berkonflik satu sama lain, menciptakan situasi di mana Iran harus mengelola kompetisi internal di antara sekutu-sekutunya. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa konsep *Wilayatul Faqih*

tidak selalu mampu menciptakan *unity of command* yang diperlukan untuk proyeksi kekuatan yang efektif.(Fox, 2019)

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Iran tetap memiliki pengaruh yang signifikan di Irak melalui jalur ekonomi, keagamaan, dan keamanan.(Rezaei, 2019) Perdagangan bilateral antara Iran dan Irak mencapai 12 miliar dolar per tahun, sementara jutaan jamaah Iran mengunjungi situs-situs suci Syiah di Irak setiap tahunnya. Pengaruh ini, meskipun tidak mencapai tingkat hegemoni seperti di Lebanon, tetap memberikan Iran *leverage* yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis Irak, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan regional dan hubungan dengan Amerika Serikat.(Kidwai, 2020)

Demikian juga, dalam kasus intervensi Iran di Syria sejak 2011 merupakan manifestasi paling ambisius dari strategi hegemoni berdasarkan konsep *Wilayatul Faqih*, namun dengan biaya yang sangat tinggi baik dari segi sumber daya maupun legitimasi regional.(Syuryansyah, 2023) Dukungan Iran terhadap rezim Bashar al-Assad telah mencapai estimasi 15-20 miliar dolar, termasuk bantuan militer, ekonomi, dan logistik yang masif.(Terrill, 2015) Investasi ini tidak hanya dimotivasi oleh kepentingan geopolitik tetapi juga oleh komitmen ideologis untuk mempertahankan *"axis of resistance"* yang merupakan implementasi praktis dari konsep Wilayatul Faqih dalam konteks regional. Keputusan Iran untuk terlibat secara masif di Syria didasarkan pada kalkulasi strategis bahwa kehilangan Syria akan memutus jalur *supply line* ke Hizbullah di Lebanon dan melemahkan posisi Iran di kawasan secara keseluruhan.(Cordesman, 2020) Dalam kerangka konsep *Wilayatul Faqih*, Syria dipandang sebagai bagian integral dari strategi resistensi terhadap hegemoni Barat dan Israel. Hal ini menciptakan situasi dimana Iran merasa berkewajiban untuk mempertahankan sekutu strategisnya meskipun menghadapi biaya yang sangat tinggi.(Milani, 2022)

Strategi Iran di Syria telah berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu mempertahankan rezim Assad di kekuasaan, namun dengan konsekuensi yang kompleks.(Hafidz et al., 2023) Keberhasilan ini telah memperkuat posisi Iran sebagai kekuatan regional yang mampu memproyeksikan kekuatan militer lintas batas, tetapi juga menciptakan resistensi yang menguat dari negara-negara Arab Sunni dan meningkatkan ketegangan dengan Israel. Intervensi Iran di Syria telah mengubah persepsi regional terhadap Iran dari kekuatan yang relatif defensif menjadi aktor yang agresif dan ekspansionis.(Dekel & Valensi, 2017) Dalam konteks teori hegemoni, keterlibatan Iran di Syria menunjukkan keterbatasan strategi yang terlalu bergantung pada instrumen koersif dibandingkan dengan pembangunan konsensus. Meskipun Iran berhasil mempertahankan Assad di

kekuasaan, dukungan populer terhadap rezim tetap terbatas dan resistensi dari kelompok-kelompok oposisi terus berlanjut.(Wahyu & Adi, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni yang *sustainable* memerlukan lebih dari sekadar dominasi militer, tetapi juga legitimasi politik yang luas.

Dampak jangka panjang dari intervensi Iran di Syria terhadap strategi hegemoni regional masih belum jelas, namun indikasi awal menunjukkan bahwa biaya yang tinggi ini telah membatasi kemampuan Iran untuk ekspansi lebih lanjut.(Bahaudin Mudore & Safitri, 2019) Sanksi ekonomi internasional yang menguat, kombinasi dengan biaya perang di Syria, telah menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan di Iran domestik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi hegemoni yang terlalu ambisius dapat kontra produktif bagi tujuan-tujuan jangka panjang Iran.

Disisi lain strategi hegemoni Iran di kawasan Timur Tengah menghadapi resistensi yang terorganisir dari blok negara-negara Arab Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi.(Mason, 2021) Resistensi ini tidak hanya bersifat geopolitik tetapi juga ideologis, dimana blok Sunni memposisikan dirinya sebagai *guardian of orthodoxy* Islam yang menentang interpretasi Syiah yang diwakili oleh konsep *Wilayatul Faqih*. Polarisasi sektarian ini telah menciptakan kompetisi zero-sum yang membatasi kemampuan Iran untuk membangun konsensus regional yang diperlukan untuk hegemoni yang efektif.(Mirza, Abbas, & Qaisrani, 2021) Arab Saudi, sebagai *leader* dari blok Sunni, telah mengembangkan strategi *counter-hegemony* yang mencakup berbagai dimensi mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga militer. Kerajaan Saudi telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung kelompok-kelompok yang menentang pengaruh Iran di berbagai negara, termasuk di Syria, Yemen, dan Lebanon.(Aftandilian, 2018) Kompetisi ini telah menciptakan *proxy wars* yang berkepanjangan yang menguras sumber daya kedua belah pihak dan menciptakan instabilitas regional yang berkelanjutan.(Abouaoun et al., 2017)

Dalam konteks teori hegemoni Gramsci, resistensi blok Sunni terhadap Iran menunjukkan pentingnya dimensi kultural dan ideologis dalam kompetisi hegemoni. Blok Sunni telah berhasil memobilisasi sentimen anti-Iran dengan menggunakan narasi sektarian yang memposisikan Iran sebagai ancaman terhadap identitas Arab dan Islam Sunni. Narasi ini telah resonan di kalangan masyarakat Arab yang mayoritas Sunni dan menciptakan hambatan struktural bagi proyeksi *soft power* Iran.(Qandil Abbas & Jahangaiz, 2020) Resistensi dari blok Sunni juga tercermin dalam pembentukan aliansi-aliansi strategis yang bertujuan untuk membatasi pengaruh Iran. Pembentukan koalisi Arab yang dipimpin Saudi di Yaman, normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel melalui *Abraham Accords*, dan penguatan kerjasama keamanan melalui

Gulf Cooperation Council merupakan manifestasi dari strategi pembatasan yang koordinatif. Aliansi-aliansi ini menjadi pembatas yang efektif terhadap proyeksi kekuatan Iran dan membatasi ruang gerak Iran di kawasan.(Faramarzi, 2018)

Efektivitas resistensi blok Sunni terhadap hegemoni Iran terlihat dari kemampuan mereka untuk mencegah Iran mencapai dominasi regional yang komprehensif. Meskipun Iran berhasil memperluas pengaruhnya di beberapa negara, resistensi yang terorganisir dari blok Sunni telah memaksa Iran untuk mengalokasikan sumber daya yang besar untuk mempertahankan posisinya.(Ostovar, 2016) Hal ini menciptakan situasi dimana Iran harus fokus pada konsolidasi dibandingkan ekspansi, yang menunjukkan bahwa strategi hegemoni Iran belum mencapai tingkat yang *sustainable*.(Rrustemi, De Wijk, Dunlop, Perovska, & Palushi, 2019)

Lalu, pada dimensi ekonomi yang menjadi faktor krusial membatasi efektivitas strategi hegemoni Iran di kawasan Timur Tengah. Sanksi ekonomi internasional yang diimplementasikan sejak 2010, terutama yang berkaitan dengan program nuklir Iran, telah secara signifikan mengurangi kemampuan Iran untuk membiayai kelompok-kelompok proksi dan program-program regional.(Sahin, 2020) Sanksi ini telah mengurangi ekspor minyak Iran dari 2.5 juta barrel per hari menjadi kurang dari 1 juta barrel per hari, yang berarti kehilangan pendapatan negara sekitar 50 miliar dolar per tahun.(Harvard, 2016) Keterbatasan ekonomi ini telah memaksa Iran untuk melakukan *recalibration* dalam strategi regionalnya, dimana prioritas diberikan kepada sekutu-sekutu strategis yang paling penting seperti Hizbullah dan rezim Assad, sementara dukungan kepada kelompok-kelompok lainnya dikurangi. Hal ini terlihat dari penurunan bantuan Iran kepada Hamas di Gaza dan beberapa kelompok milisi di Irak. Dalam konteks teori hegemoni, keterbatasan material ini menunjukkan bahwa hegemoni yang *sustainable* memerlukan basis ekonomi yang kuat untuk mempertahankan jaringan aliansi yang luas.

Sanksi ekonomi juga telah menciptakan tekanan domestik di Iran yang membatasi legitimasi untuk kebijakan regional yang ekspansif. Masyarakat Iran menghadapi inflasi yang tinggi, pengangguran yang meningkat, dan penurunan standar hidup yang signifikan, yang menciptakan pertanyaan mengenai prioritas alokasi sumber daya negara. Protes-protes yang terjadi di Iran sejak 2017 menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempertanyakan kebijakan luar negeri yang mahal sementara kondisi ekonomi domestik memburuk.(Holliday, 2023) Dalam upaya mengatasi keterbatasan ekonomi, Iran telah mengembangkan strategi diversifikasi yang mencakup kerjasama dengan China dan Russia, pengembangan ekonomi *resistance economy*, dan peningkatan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga.(Czarkowska & Kumelska-

Koniecko, 2023) Namun, strategi ini belum mampu sepenuhnya mengatasi dampak sanksi internasional.(Houghton, 2022) Kerjasama dengan China, meskipun signifikan, masih terbatas oleh kekhawatiran China terhadap sanksi sekunder dari Amerika Serikat.(Mustofa, 2023)

Dampak jangka panjang dari keterbatasan ekonomi terhadap strategi hegemoni Iran adalah perlunya transisi dari strategi yang material-intensive menuju strategi yang lebih bergantung pada *soft power* dan *diplomatic engagement.*(Qandil Abbas & Jahangaiz, 2020) Hal ini memerlukan reinterpretasi konsep *Wilayatul Faqih* yang lebih menekankan pada dimensi kultural dan ideologis dibandingkan dengan proyeksi kekuatan material. Transisi ini menunjukkan bahwa hegemoni yang *sustainable* harus adaptif terhadap perubahan kondisi struktural baik domestik maupun internasional.

Strategi hegemoni Iran berdasarkan konsep *Wilayatul Faqih* menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Pertama, resistensi dari negara-negara Arab Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi telah menciptakan polarisasi sektarian yang menghambat proyeksi pengaruh Iran. Kedua, sanksi ekonomi internasional telah membatasi kemampuan Iran untuk memberikan dukungan material kepada kelompok-kelompok proksinya. Ketiga, munculnya gerakan-gerakan nasionalis di berbagai negara telah menciptakan resistensi terhadap pengaruh asing, termasuk Iran. Keempat, perubahan dinamika geopolitik regional, termasuk normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel, telah mengubah kalkulasi strategis di kawasan dan berpotensi mengisolasi Iran.

Dalam konteks teori hegemoni Gramsci, kasus Iran menunjukkan bagaimana konsep religius dapat menjadi instrumen hegemoni yang efektif dalam konteks masyarakat yang religius.(Thomas R. Bates, 1975) Konsep *Wilayatul Faqih* telah memungkinkan Iran membangun kepemimpinan intelektual dan moral yang melampaui batas-batas teritorial. Namun, efektivitas hegemoni ini bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan legitimasi dan relevansi di tengah perubahan dinamika regional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hegemoni dalam konteks kawasan tidak selalu bersifat total atau permanen.(Nasr, 2018) Hegemoni Iran di Timur Tengah bersifat kontekstual dan menghadapi tantangan yang konstan dari berbagai aktor regional dan internasional. Hal ini mengkonfirmasi pandangan Gramsci bahwa hegemoni merupakan proses yang dinamis dan memerlukan negosiasi yang terus-menerus.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *Wilayatul Faqih* telah menjadi instrumen fundamental dalam strategi hegemoni Iran di kawasan Timur Tengah.

Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem tata kelola domestik tetapi juga sebagai ideologi ekspor yang memungkinkan Iran membangun jaringan pengaruh transnasional. Melalui analisis dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Iran telah berhasil membangun kepemimpinan intelektual dan moral di sebagian kawasan melalui kombinasi legitimasi religius dan dukungan material. Mekanisme proyeksi pengaruh Iran melalui konsep *Wilayatul Faqih* meliputi pembentukan aliansi ideologis, dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi, dan pengembangan jaringan institusi keagamaan. Efektivitas strategi ini bervariasi tergantung pada konteks lokal dan dinamika geopolitik regional. Keberhasilan Iran di Lebanon dan Syria kontras dengan tantangan yang dihadapi di Irak dan resistensi dari blok Sunni yang dipimpin Arab Saudi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hegemoni dalam konteks kawasan bersifat kontekstual dan dinamis, memerlukan adaptasi yang terus-menerus terhadap perubahan kondisi regional dan internasional. Konsep *Wilayatul Faqih* telah terbukti sebagai instrumen *soft power* yang efektif, namun keberhasilannya bergantung pada kemampuan Iran untuk mempertahankan legitimasi dan relevansi di tengah tantangan yang kompleks. Penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman mengenai dinamika hegemoni regional dan peran ideologi religius dalam politik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1; P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press.

Abouaoun, E., Al-Qarawee, H., Fegiery, M. El, Fadel, M., Iharchane, O., Maghraoui, D., … Uddin, A. T. (2017). *Report Part Title: Religious Leaders and the Sunni-Shia Divide in the Middle East, Report Part Author(s): Harith Hasan Al-Qarawee, Report Title: Islam and Human Rights Report, Subtitle: Key Issues for Our Times*. Retrieved from http://www.jstor.com/stable/resrep03717.6

Aftandilian, G. (2018). *Maneuvering The Saudi-Iranian Rivalry In The Middle East: How The United States Can Preserve And Protect Its Long-Term Interests In The Region* (1st ed., Vol. 1). New York: Strategic Studies Institute, US Army War College. Retrieved from http://www.jstor.com/stable/resrep20095

Bahaudin Mudore, S., & Safitri, N. (2019). Dinamika Perang Suriah: Aktor Dan Kepentingan. *POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam*, *2*(2), 67–92.

Bardají, R. L. (2016). Religion, Power and Chaos in the Middle East. *European View*, *15*(1), 87–95. https://doi.org/10.1007/s12290-016-0391-9

Belal, K. (2020). Emerging Politics in Iran: Last Year of Rouhani's Term and the New Conservative Parliament. *Policy Perspectives*, *17*(1), 105–127. https://doi.org/10.13169/polipers.17.1.0105

Cherstich, I., Holbraad, M., & Tassi, N. (2020). Chapter Title: State and Revolution: Nations, Tribes, and Lineages. In *Anthropologies of Revolution* (1st ed., Vol. 1, pp. 41–65). California: University of California Press. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/j.ctv2rb75ns.6

Clausen, M.-L. (2020). *IRAN'S SUCCESSFUL TRANSNATIONAL NETWORK: Iranian foreign policy utilizes partners*. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/resrep27546

Connable, B. (2020). *Report Part Title: America's Experience with and in Iraq Title: AN ENDURING AMERICAN COMMITMENT IN IRAQ Report Subtitle: SHAPING A LONG-TERM STRATEGY WITH IRAQI ARMY PARTNERS*. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/resrep26550.6

Cordesman, A. H. (2020). *The Gulf and Iran's Capability for Asymmetric Warfare*. Retrieved from : https://www.jstor.org/stable/resrep29333

Czarkowska, E., & Kumelska-Koniecko, M. (2023). Iran-Russia-Türkiye Triangle. *Source: Insight Turkey*, *25*(3), 199–222. https://doi.org/10.2307/48744767

Dekel, U., & Valensi, C. (2017). *The Iranian Threat in Syria: As Bad as It Seems?* Retrieved from http://www.jstor.com/stable/resrep08798

Doix, V. (2017). Iran. *Politique Etrangere*, *82*(4), 131–143. https://doi.org/10.2307/48562355

Faramarzi, S. (2018). *Iran's Sunnis Resist Extremism, but for How Long?* Retrieved from https://iranwire.com/en/features/4725.

Fazlhashemi, M. (2021). Brill Chapter Title: Imāmiyya Shīʿa (The Twelvers). In M. Afzal Upal & C. M. Cusack (Eds.), *Handbook of Islamic Sects and Movements* (1st ed., Vol. 1, pp. 181–202). Brill. https://doi.org/10.1163/j.ctv1v7zbv8.14

Fox, A. C. (2019). Conflict and the Need for a Theory of Proxy Warfare. *Journal of Strategic Security*, *12*(1), 44–71. https://doi.org/10.2307/26623077

Ghasseminejad, S., Taleblu, B., & Katz, E. (2020). Evolution Toward Revolution. *Source: Journal of International Affairs*, *73*(2), 147–162. https://doi.org/10.2307/26939971

Hafidz, D., Wardhana, A., Fauzi Kusmin, A., Sajidin, M., Nuraliah, D., Nasiruddin, N., & Antuli, R. R. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah sebagai Konsekuensi dari Politik Engtangling Alliance. *Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik*, *6*(1), 22–38. https://doi.org/10.31605/arajang.v4i1

Hage Ali, M. (2019). *Report Part Title: Hezbollah's Intervention in the Syrian Conflict Report Title: Power Points Defining the Syria-Hezbollah Relationship*. Retrieved from http://www.jstor.com/stable/resrep20960.6

Harvard, M. P. (2016). Review: Reform or Revolution? Iran's Path to Democracy, Reviewed Work(s): Democracy in Iran: Why It Failed and How It Might Succeed, Review: Haleh Esfandiari. *Foreign Affairs*, *97*(1), 143–149. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/44822022

Holliday, S. J. (2023). Beyond hegemony, world order as domination: Iran's Green Movement and the nuclear sanctions regimes. *International Relations*. https://doi.org/10.1177/00471178231151908

Homan, K. (2018). Hezbollah. *Source: Atlantisch Perspectief*, *42*(1), 34–38. https://doi.org/10.2307/48581406

Houghton, B. (2022). China's Balancing Strategy Between Saudi Arabia and Iran: The View from Riyadh. *Asian Affairs*, *53*(1), 124–144. https://doi.org/10.1080/03068374.2022.2029065

Humire, J. M. (2020). *Report Part Title: Hezbollah and Crime-Terror Convergence, Report Title: THE MADURO-HEZBOLLAH NEXUS: Report Subtitle: How Iran-backed Networks Prop up the Venezuelan Regime*. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/resrep29477.4

Iqbal, M. (2020). Perspektif Syiah Imamiyah Tentang Dimensi Tauhid. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, *1*(2), 162. https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i2.7226

Itzchakov, D. (2025). *Iran's Quds Day: A Manifest of Animosity*. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/resrep70385

Jones, S. G. (2020a). *Report Part Title: Irregular Military Power Report Title: Containing Tehran Report Subtitle: Understanding Iran's Power and Exploiting Its Vulnerabilities*. New York. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/resrep29480.6

Jones, S. G. (2020b). *Report Part Title: Soft Power Report Title: Containing Tehran Report Subtitle: Understanding Iran's Power and Exploiting Its Vulnerabilities*. New York. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/resrep29480.9

Kadir, A. (2015). Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*, *5*(1), 1–15.

Kane, J. R. (2018). A Life Cycle Analysis of Hezbollah. *National Military Intelligence Foundation*, *35*(2), 67–73. https://doi.org/10.2307/26566567

Keskin, Y. B. (2024). Reviewed Work(s): A Self-Fulfilling Prophecy: The Saudi Struggle for Iraq by Katherine Harvey. *Insight Turkey*, *26*(2), 333–336. https://doi.org/10.2307/48778431

Khan, A., & Zhaoying, H. (2020). Iran-Hezbollah Alliance Reconsidered: What Contributes to the Survival of State-Proxy Alliance? *Source: Journal of Asian Security and International Affairs*, *7*(1), 101–123. https://doi.org/10.2307/48601806

Kidwai, S. A. (2020). The Rise of Iran as a Regional Power. *India Quarterly*, *76*(2), 313–328. https://doi.org/10.2307/48589368

Kumar, V. (2016). Sectarianism and International Relations: Shia Iran in a Muslim World. *Journal of Asian Security and International Affairs*, *3*(3), 359–373. https://doi.org/10.2307/48602154

Limanya Limbu, A., & Cohen, R. A. (2025). A State Under Siege: Iran's Survival Through Alter-Globalization and the Third Way. *Journal of Asian and African Studies*, *60*(2), 824–843. https://doi.org/10.1177/00219096231179650

Mason, R. (2021). Saudi-Iranian Relations and the Future of the Middle East. *Bustan: The Middle East Book Review*, *12*(2), 114–128. https://doi.org/10.5325/bustan.12.2.0114

Milani, A. (2022). Chapter Title: Iran's Culture Wars in the Arab World. In L. Blaydes, A. Hamzawy, & H. Sallam (Eds.), *Book Title: Struggles for Political Change in the Arab World, Book Subtitle Regimes, Oppositions, and External Actors after the Spring* (1st ed., Vol. 1, pp. 373–391). University of

Michigan Press. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.12237894.22

Mirza, M. N., Abbas, H., & Qaisrani, I. H. (2021). Structural Sources of Saudi–Iran Rivalry and Competition for the Sphere of Influence. *SAGE Open*, *11*(3), 1–9. https://doi.org/10.1177/21582440211032642

Murauskaite, E. (2016). Saddam's Use of Violence against Civilians during the Iran-Iraq War. *Source: Middle East Journal*, *70*(1), 47–68. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/43698619

Mustofa, A. Z. (2023). Kepentingan China sebagai Aktor di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi dan Iran. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *14*(2), 253–268. https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.253-268

Nasr, V. (2018). Iran Among the Ruins Tehran's Advantage in a Turbulent Middle East. *Source: Foreign Affairs*, *97*(2), 108–118. Retrieved from https://about.jstor.org/terms

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed., Vol. 1; M. Albina, Ed.). Bandung: CV. Harfa Creative.

Nilsson, M. (2020). Hezbollah and the framing of resistance. *Third World Quarterly*, *41*(9), 1595–1614. https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1779587

Ostovar, A. (2016). *Sectarian Dilemmas in Iranian Foreign Policy: When Strategy and Identity Politics Collide*. Massachusetts. Retrieved from http://www.jstor.com/stable/resrep13024

Patria, Nezar & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qandil Abbas, S., & Jahangaiz, M. (2020). Iran's Foreign Policy towards Lebanon: Success Story of Synergy between Hard and Soft Power. *Journal of Research in Social Sciences (JRSS)*, *8*(2), 116–134. https://doi.org/doi.org/10.52015/jrss.8i2.58

Rezaei, F. (2019). Iran's military capability: The structure and strength of forces. *Insight Turkey*, *21*(4), 183–214. https://doi.org/10.25253/99.2019EV.01

Rijal, T. S., & Palangkey, R. D. (2021). Metamorposis Syiah: Antara Politik, Mahdzab, Teologi dan Konsep Negara Teokrasi. *Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)*, *2*(2), 148–159.

Rrustemi, A., De Wijk, R., Dunlop, C., Perovska, J., & Palushi, L. (2019). *Report Part Title: Iran Report Title: Geopolitical Influences of External Powers in the Western Balkans Report*. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/resrep19582.12

Sahin, S. B. (2020). Tracing Discursive Strategies to Understand the U.S. Withdrawal from the Iranian Nuclear Deal. *Uluslararası İlişkiler / International Relations, 17*(66), 62–76. https://doi.org/10.2307/26921455

Samaan, J.-L. (2015). Israël-Hezbollah : la nouvelle équation stratégique. *Institut Français Des Relations Internationales*, *80*(2), 113–123. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/24638685

Simon, R. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Smyth, P., Michetti, T., & Daniels, O. (2017). *Report Part Title: Iraq and Syria: Report Title: Revolution Unveiled: Report Subtitle: A Closer Look At Iran's*

Presence and Influence in The Middle East. Retrieved from http://www.jstor.com/stable/resrep03726.6

Syuryansyah, S. (2023). Intervensi Militer Amerika Serikat Dalam Konflik Suriah Tahun 2011. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, *9*(2), 206–222. https://doi.org/10.24952/tazkir.v9i2.8851

Terrill, W. A. (2015). Iran's Strategy for Saving Asad. *Source: Middle East Journal*, *69*(2), 222–236. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/43698235

Thomas R. Bates. (1975). Gramsci and the Theory of Hegemony. In *Journal of the History of Ideas* (Vol. 36, pp. 351–366). University of Pennsylvania Press. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2708933

Uygur, H. (2021). Iran Under Raisi's Presidency. *Insight Turkey*, *23*(3), 39–52. https://doi.org/10.2307/48673697

Wahyu, D., & Adi, S. (2020). Pembatasan Hak Veto dalam DK-PBB Terkait Konflik Bersenjata di Suriah. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, *1*(9), 1–20. Retrieved from https://jhlg.rewangrencang.com/